

BAB II

PERBANDINGAN ANTARA WELFARE STATE GANDHI DENGAN WELFARE STATE KONTEMPORER DALAM MENAHAN NEO-LIBERALISME

Kesejahteraan seperti yang penulis uraikan sebelumnya, merupakan dambaan bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini dan selalu menjadi isu yang tak akan pernah habis untuk dibahas. Setelah mengalami transformasi selama beabad-abad, konsep tentang kesejahteraan dan lebih utamanya negara kesejahteraan (*welfare state*) kembali muncul ke permukaan di beberapa negara seperti Jerman, Swiss dan kawasan Skandinavia. Dengan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan, berbagai upaya dilakukan, termasuk mengubah ideologi dan mindset masyarakat.

Konsep ini kembali muncul ke permukaan dan dipopulerkan melalui berbagai fase perbaikan dan disesuaikan terhadap keadaan dunia Internasional saat ini, termasuk perbaikan terhadap munculnya berbagai masalah yang semakin membuat kesenjangan sosial dalam skala besar seperti Neo-Liberalisme dan era Globalisasi. Konsep *welfare state* sendiri menurut penulis, merupakan sebuah konsep yang tidak memihak siapapun dan hanya berusaha untuk mencarikan jalan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di dunia. Selain itu juga mencari jalan menuju kesejahteraan yang selalu diidam-idamkan umat manusia.

A. Sejarah Welfare State

Pada dasarnya, nilai-nilai kesejahteraan sudah berkembang dari zaman dahulu ketika masyarakat masih bermukim di dalam komunitas-komunitas kecil. Hal ini bisa dilihat dari cara masyarakat dahulu saling bahu-membahu dalam mencari makanan dan berburu, saling tolong menolong, sampai dengan menciptakan hukum-hukum adat yang harus ditaati di dalam komunitas tersebut. Kesejahteraan seolah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman, sehingga walaupun konsep tentang kesejahteraan jarang disinggung secara gamblang di era ini, kesejahteraan tetap menjadi isu yang tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas.

Dengan berkembangnya prinsip-prinsip kesejahteraan, maka dibuatlah sebuah konsep tentang kesejahteraan negara atau yang kita sering sebut Negara Kesejahteraan. Konsep Negara Kesejahteraan pertama kali muncul di Inggris yang diartikan sebagai terbebasnya seseorang dari kelaparan dan kemiskinan yang ekstrem. Konsep ini tertera di dalam undang-undang kemiskinan pada pemerintahan Elizabeth I di Inggris sekitar tahun 1598 dan diperbaharui lagi pada tahun 1601. Undang-undang ini menyerukan bahwa, kemiskinan harus dihapuskan dan jemaah gereja dijadikan sebagai unit basis dari administrasi lokal penghapusan kemiskinan.¹⁹ Selain itu, jemaah gereja juga wajib menyediakan kebutuhan pokok bagi mereka yang tidak mampu bekerja karena sakit, kekurangan fisik dan juga orang tua jompo.

Cara-cara yang ditempuh untuk membantu mereka ini adalah dengan meningkatkan pajak bagi setiap orang kaya yang ada dalam ruang lingkup gereja. Namun setelah berabad-abad, undang-undang ini mengalami kegagalan dalam penerapannya dikarenakan pengimplementasiannya di dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya, selama berabad-abad Inggris mencari formula untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan yang parah melalui berbagai perombakan undang-undang tentang kesejahteraan. Undang-undang tentang kesejahteraan ini akhirnya disempurnakan dengan dikeluarkannya undang-undang kemiskinan yang dilanjutkan dengan undang-undang asistensi nasional tahun 1948 di Inggris.

Tidak ada perbedaan mendasar antara undang-undang tahun 1906 dengan undang-undang tahun 1948. Perbedaan hanya terletak pada implementasi pelayanan yang dirubah seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, asuransi-asuransi, dan jaminan pokok lainnya yang nantinya akan menjadi instrument utama di dalam Negara Kesejahteraan modern.

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep Negara Kesejahteraan mengalami berbagai modifikasi sehingga disesuaikan dengan keadaan dan kondisi suatu negara itu sendiri. Pada dasarnya ideologian *welfare state* yang berkembang saat ini adalah dimana masyarakatnya mendapatkan jaminan penuh secara sosial, ekonomi dan politik. Salah satu yang bisa dijadikan pelajaran penting yang didapat dari undang-undang tentang kesejahteraan di Inggris adalah penerimaan secara kolektif di masyarakat secara keseluruhan atas tanggung jawab terhadap kesejahteraan warga negaranya yang kurang

beruntung, demi mengentaskan mereka dari permasalahan kemiskinan yang parah.

Semangat tersebut lalu muncul dalam sistem yang lebih institusional. Tetapi, sistem ini lebih menunjukkan semangat kedermawanan individu daripada penyelesaian secara kolektif secara institusi²⁰. Dan hal inilah yang menjadi kelemahan mendasar bagi sistem kesejahteraan untuk bekerja. Pemanfaatan posisi dan kekuasaan oleh para dermawan akhirnya menjadikan jurang pemisah yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin yang berimbas pada perekonomian si miskin yang hanya bisa berharap belas kasih si kaya. Pada akhirnya si kaya tetap menjadi kaya, dan orang miskin semakin banyak.

B. Hasil dari Pemantapan Welfare State

Tidak dapat dipungkiri memang, bahwasanya konsep welfare state mampu memberikan sebuah perubahan yang signifikan terhadap negara yang menganutnya. Perubahan-perubahan dan perbaikan tersebut dapat kita lihat melalui aspek kesejahteraan manusia dan juga aspek kesejahteraan ekonomi. Dalam aspek kesejahteraan manusia, perbaikan sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat di bidang jasa, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dalam negara kesejahteraan kebanyakan bentuk pembelanaan yang dilakukan oleh

negara meliputi pembelanjaan untuk konsumsi dan investasi.²¹ Negara menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyat.

Dengan cara ini, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap negara. Kontribusi ini diberikan melalui kerja dan pembelanjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan dari bantuan nasional dan jaminan sosial, fasilitas-fasilitas seperti perumahan yang diusung negara kesejahteraan. Melalui kebijakan jaminan kesehatan dan pendidikan, SDM mengalami peningkatan yang sangat baik.

Sistem pelayanan seperti ini sangat baik untuk meningkatkan potensi masyarakat dan mengurangi beban orang miskin. Dengan demikian, orang miskin tadi, tidak perlu lagi berfikir ulang untuk berbelanja dan secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada negaranya. Inilah salah satu hal yang paling mustahil terjadi pada orang miskin jika mekanisme dilandaskan pada sistem pasar bebas. Peningkatan kualitas hidup manusianya juga semakin membaik. Secara tidak langsung, sistem seperti ini akan meningkatkan pendapatan si orang miskin tadi. Hal ini juga dapat terjadi atas pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerataan konsumsi. Tentu saja, standar-standar kesejahteraan ini tetap bergantung dari di negara mana ini digunakan, karena jelas standar hidup di masing-masing negara berbeda-beda.

Secara ekonomi, sistem negara kesejahteraan juga mampu memberikan kontribusi yang baik bagi rakyat di sebuah negara. Dalam negara

kesejahteraan, setiap masyarakat mendapatkan tunjangan baik bekerja maupun tidak. Namun kebijakan ini sering dikritisi karena tingginya pajak yang dikenakan terhadap orang yang bekerja. Hal ini akan membuat semangat kerja rakyat menurun karena meskipun menerima tunjangan, pajak yang diberlakukan tinggi. Jadi bekerja maupun tidak, hasilnya sama saja. Namun justru rakyat tidak kehilangan akal, banyak dari mereka yang berwiraswasta karena dari situ bisa menutupi pembayaran pajak yang pada umumnya disamaratakan bagi pekerja. Sebaliknya hal ini justru membuat mereka menjadi hemat dan membudidayakan menabung.²² Karena tingkat pajak yang tinggi, pada umumnya masyarakat menghemat agar bisa membayar pajak.

C. Konsep Welfare State Kontemporer (Modern)

Letak erbedaan antara konsep *welfare state* klasik dengan Konsep *welfare state* modern sendiri terletak pada implementasi dalam memberikan kesejahteraan kepada warganya. *Welfare state* modern pada umumnya lebih menggunakan cara-cara seperti memberikan jaminan kepada masyarakatnya, sehingga terhindar dari kemiskinan dan kelaparan.²³ Karena dengan ini mereka percaya bahwa dengan memberikan jaminan kepada masyarakatnya, maka masyarakat akan patuh terhadap pemerintah dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di negara itu.

²² *Ibid*, Hal 46-49

²³ Upaya mewujudkan negara kesejahteraan, diakses pada tanggal 12 April 2011 dari <http://stihyusticia.blogspot.com/2011/03/upaya-mewujudkan-negara-kesejahteraan.html>

Jaminan-jaminan yang ditawarkan oleh konsep *welfare state* modern adalah jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dll. Pada intinya negara merupakan pemegang kunci dan bertanggung jawab terhadap warga negaranya atas apapun yang menimpa warganya. Di Skandinavia (Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark), konsep Negara kesejahteraan modern telah menjadi ideologi dan sistem yang berjalan dengan cukup baik. Salah satu kunci keuntungan dari sistem Negara kesejahteraan adalah tidak ada satupun warga Negara yang menderita atau dibiarkan menderita baik dari segi ekonomi maupun sosial. Syarat-syarat *welfare state* modern secara umum adalah:

1. Sistem perpajakan yang baik.
2. Kalau terdapat banyak UKM maka tingkat kesejahteraan akan semakin kecil (pengaruh dari *tax system*)
3. Ada *social trust* yang besar, tanpa ada *social trust* maka tidak ada pembayar pajak.
4. Perlu adanya serikat pekerja yang kuat.
5. Penduduknya harus homogen (populasi yang tersebar harus homogen baik etnis maupun agama).

Adanya institusi sosial yang kuat akan membuat masyarakat terbiasa dengan *rules of the game* yang diciptakan oleh pemerintah. Institusi sosial merupakan struktur dasar masyarakat yang berperan dalam menciptakan

Nilai penting yang dibawa *welfare state* adalah mengurangi jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan cara mendistribusikan uang dari si kaya kepada si miskin²⁴. Distribusi keuntungan yang diatur oleh negara ini salah satu caranya dilakukan dengan menempatkan pihak buruh dan pengusaha secara seimbang, memiliki hak yang sama dan setara. Di dalam *welfare state*, pihak buruh tidak mendominasi sektor dan kebijakan ekonomi namun menjadi aktor aktif dalam membangun perekonomian sejajar dengan para pengusaha. Terdapat pula para pengusaha yang tanpa intervensi dari negara berupaya membangun forum terbuka dengan para buruh. Forum ini bertujuan untuk mencapai negosiasi kebijakan berdasarkan prinsip sama-sama untung antara pihak pengusaha dan pihak buruh.

Gagasan *welfare state* mempercayai bahwa perubahan ekonomi secara cepat dan radikal justru akan memicu bencana besar. Laju perekonomian yang perlahan namun pasti akan membawa keselamatan ekonomi bagi *welfare state*. Namun dalam penerapan yang sesungguhnya, konsep *welfare state* sangat fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi-politik, serta budaya di dalam negara yang menganutnya. Di Jerman misalnya, karena dianggap terlalu besar mengeluarkan biaya untuk kesejahteraan warga, membuat beberapa kebijakan dirubah. Seperti, jaminan yang selama ini pasti didapatkan, diganti dengan pinjaman agar masyarakat miskin itu mau bekerja dan tidak menggantungkan diri pada negara.

²⁴ Pengertian negara sejahtera, diakses pada tanggal 3 Februari 2011 dari http://id.kluonline.com/law_and_politics/politics/2000873_pengertian_negara_sejahtera-welfare-

Seperti halnya konsep-konsep lain, konsep *welfare state* juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Beberapa diantaranya adalah jaminan-jaminan yang diberikan oleh kebijakan *welfare state*, menjadikan semangat kerja masyarakat menurun. Ada dua kelompok yang mengalami hal ini di dalam *welfare state* yaitu kelompok yang menerima tunjangan, dan kelompok yang membayar pajak yang tinggi.²⁵ Terutama mereka yang dikenakan pajak secara progresif yang dihitung berdasarkan rentang pendapatan yang diperoleh dari kerja ekstra atau kerja lebih keras.

Permasalahan ini merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh penganut *welfare state*. Dan meskipun sudah berbagai cara dilakukan, penurunan semangat kerja masih saja terus ada. Contohnya, ketentuan tentang upah para pensiunan telah menurunkan minat mereka untuk bekerja paruh waktu²⁶. Penurunan semangat bekerja juga dikarenakan jika mereka bekerja paruh waktu, maka dana pensiun juga akan berkurang. Sama halnya dengan laki-laki yang berasal dari keluarga miskin. Pria ini tidak akan berminat untuk bekerja lebih giat dibandingkan apa yang ia kerjakan sekarang. Karena jika ia bekerja lebih keras, maka dia akan dikurangi tunjangannya, dan bertambah membayar pajaknya. Hal ini juga yang membuat para pekerja keras pada akhirnya tidak mau lagi bekerja, karena akan membayar pajak yang mahal.

Apalagi mereka yang terkena pajak progresif karena mempunyai kerja lebih dari satu, merasa bahwsanya jam kerja mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan karena pasti dipotong pajak yang tinggi. Pada

²⁵ Alappat, *Op. Cit.* Halaman 236-237

²⁶ *Ibid*, Hal 46-49

akhirnya kritik terhadap *welfare state* pun mengatakan bahwa, *welfare state* menghilangkan potensi individu setiap manusia hanya demi satu tujuan, yaitu kesejahteraan.²⁷ Manusia-manusia yang memiliki potensi berada pada posisi yang tidak adil karena kemampuan yang mereka miliki harus dibayar dengan pajak yang terkadang terlalu berlebihan.

D. Skandinavia dan Ideologian Welfare State

Nama Skandinavia merujuk pada wilayah Semenanjung Skandinavia yang berada di bagian utara Benua Eropa. Sehingga bangsa-bangsa yang mendiami wilayah tersebut disebut juga sebagai Bangsa Skandinavia. Di daerah semenanjung ini terdapat tiga negara yaitu Norwegia, Swedia, Finlandia, sedangkan Denmark dan Eslandia terpisah dari semenanjung tersebut karena Denmark berada di utara Jerman dan Eslandia yang terletak di Laut Utara antara Benua Eropa dan Pulau Greenland. Namun kedua negara tersebut termasuk dalam wilayah dihuni oleh bangsa Skandinavia. Negara-negara skandinavia juga lazim disebut sebagai negara “nordic” karena lokasinya di utara Eropa dan masuk dalam lingkaran arktik atau wilayah yang telah dekat dengan zona kutub utara.²⁸ Dengan kondisi iklim yang sedikit menyamai iklim di kutub.

Bangsa Skandinavia berasal dari suku bangsa Germanik, Goths, Vandal dan Saxon yang telah ribuan tahun mendiami wilayah yang sekarang

²⁷ Konsep *welfare state*, diakses pada tanggal 18 Mei 2011 dari <http://www.oberlin.edu/politics/howell/Politics%20317%20Syllabus%202004.pdf>

²⁸ Nurmani, S. *Regionalisme Dalam Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar, 2010.

menjadi negara-negara nordic di atas. Mereka menyebut diri mereka sebagai Norsemen atau Orang Utara. Pada abad XI masehi, Bangsa Skandinavia dikenal dengan sebutan Bangsa Viking. Pada masa tersebut Bangsa Viking ditakuti di seluruh Benua Eropa karena mereka terkenal sebagai bajak laut kejam yang membantai perempuan dan anak-anak selain merompak habis harta benda penduduk di setiap daerah yang mereka serang.

Dengan kemahiran mereka sebagai Pelaut ulung, Bangsa Viking menguasai lautan Eropa, mereka menindas Bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Perancis, Spanyol bahkan Rusia yang pada era itu masih terbelakang atau dikenal sebagai Abad Kegelapan. Namun perilaku buruk dan brutal dari bangsa Viking tersebut hanyalah kisah pada masa lalu yang kini sudah menjadi legenda dan santapan para penikmat sejarah.

Pada Abad Milenium ini Bangsa Skandinavia identik dengan predikat sebagai salah satu bangsa dengan berbagai keunggulan di berbagai bidang kehidupan. Tidak banyak orang yang mengetahui sistem hidup di Negara-negara Skandinavia karena memang jarang sekali ada isu yang memunculkan mereka ke permukaan.

Di Negara-negara Skandinavia (Nordic), seperti Swedia, Norwegia, dan Finlandia, kesejahteraan dan *welfare state* sangat populer dan bahkan sudah menjadi ideologian. Hal yang paling mencolok adalah pemungutan pajak yang sangat tinggi. Di Swedia misalnya angka pajak mencapai 25

persen.²⁹ Pajak yang sangat tinggi. Sebagai timbale baliknya, melalui pajak warganya ini lah pemerintah dapat melayani masyarakat dengan sangat baik. Subsidi dan jaminan sosial yang diberikan hampir di semua sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, tunjangan pengangguran, sampai dengan tunjangan hari tua. Belanja negara rata-rata mencapai 60 persen dari total anggaran negara.

Negara-negara Skandinavia terkenal dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, dan juga pengembang di bidang teknologi dan otomotif seperti Volvo, Sony-Ericsson, Nokia, dan lainnya. Dari perusahaan-perusahaan besar inilah negara menarik pajak yang tinggi, lalu dibelanjakan untuk melayani warga negaranya. Meskipun begitu, Negara-negara Skandinavia ini bukannya tidak mengalami masalah. Di Swedia misalnya, dalam perjalanannya banyak mengalami masalah pengangguran yang mencapai angka 5-6 persen pada tahun 2006. Hal ini diakibatkan oleh penyakit malas bekerja. Semangat kerja yang menurun juga merupakan masalah yang dihadapi penerapan sistem *welfare state*. Mereka malas karena semuanya telah dijamin oleh pemerintah.

Analoginya adalah jika bekerja, pasti dikenakan pajak. Jika tidak bekerja, tidak akan terkena pajak dan mendapat subsidi. Sementara itu, jaminan sosial yang diberikan sama antara si kaya dan si miskin. aDisisi lain, Negara-negara Skandinavia ini belum mau bergabung dengan Persatuan Moneter Eropa (PME). Dikhawatirkan jika mereka bergabung akan dipaksa

²⁹ Analisis mengenai konsep *welfare state*, diakses pada tanggal 22 Mei 2011 dari

melakukan harmonisasi pajak seperti pajak pendapatan, bea masuk, dan PPN lainnya.

E. Konsep Welfare State Gandhi

Mahatma Gandhi memang lebih terkenal dengan pesan-pesannya tentang perdamaian, anti kekerasan, dan kasih sayang sesama manusia. Namun ternyata, dalam mewujudkan perdamaian Gandhi juga menempuh jalan-jalan yang didalamnya terkait dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat, politik, ekonomi, serta sosial budaya.

Gandhi dalam konsep-konsepnya tentang politik, ekonomi, dan sosial budaya, Gandhi mencampurkan unsure-unsur manusiawi sehingga menjadikan konsep-konsep tersebut fleksibel dan mampu diterapkan dengan cara yang gampang. Bukan hanya itu, filosofi-filosofi yang dikemukakan Gandhi lebih bersifat spiritualis dan humanis, sehingga kepentingan manusia secara keseluruhan menjadi pertimbangan utama Gandhi dalam mengutarakan ide-idenya.

Berbeda halnya dengan pakar-pakar politik dan ekonomi lain yang lebih cenderung membahas persoalan ini dengan pendekatan strukturalis. Seperti halnya konsep tentang satyagraha, yang mempunyai arti perlawanan pasif, ataupun nir-kekerasan, dan juga berpegang teguh pada kebenaran yang mampu diterapkan dalam aspek politik dan ekonomi sehari-hari.³⁰

³⁰ M.K. Gandhi, *Mahatma Gandhi Sebuah Autobiografi*, Penerbit Narasi, Terj. Andi

Setelah mengalami beberapa fase dalam mencari kebenaran, mulai dari belajar di Inggris, lalu ke Afrika Selatan, dan kembali lagi ke India, Gandhi mengumpulkan semua pengalaman yang Ia alami dan mencapai sebuah kesimpulan tentang kesejahteraan.

Ketika Gandhi belajar di Inggris, Ia menemukan study tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang kala itu pertama kali dibuat undang-undangnya di Inggris. Namun konsep Negara Kesejahteraan yang dibangun Gandhi bukan hanya sebatas pemenuhan materi di dalam sebuah Negara, tetapi juga bagaimana menciptakan sebuah konsep tentang perpaduan antara materi dan spiritualitas dimana manusia dijadikan pertimbangan utama. Melalui beberapa tahapan perubahan, Gandhi mulai merangkai ulang konsep *welfare state* yang ada di Inggris, dan menyesuaikannya dengan masyarakat yang ada di India saat itu. Adapun beberapa hal dari syarat-syarat terciptanya *welfare state* yang dikonversi oleh Gandhi dan disesuaikan dengan keadaan di

Tabel 1.1

NO.	WELFARE STATE	PERUBAHAN TERHADAP WELFARE STATE OLEH GANDHI
1	<p>Sistem perpajakan yang ketat dan pemungutan pajak yang tinggi. Ketika pertama kali Welfare State dimuat dalam Undang-Undang Inggris pada tahun 1906, tarif pajak yang dipungut bagi kaum borjuis sangat tinggi. Dan hal ini masih berlaku sampai sekarang di negara-negara Eropa macam Swedia, Jerman, Finlandia, dan Luxemburg. Dan pengaruh <i>tax sistem</i> seperti ini sangat berpengaruh terhadap semangat kerja warga negara yang menurun.</p>	<p>Pada dasarnya pemungutan pajak relatif dan sesuai dengan keadaan negara. Gandhi sadar, jika membuat sistem perpajakan yang ketat dan membuat tarif yang tinggi sangatlah tidak mungkin di India. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi rakyat India yang saat itu rendah dan tingkat konsumsi yang rendah sampai dengan saat ini. Ia mengubahnya melalui pengkampanyean <i>satyagraha</i> yang menekankan aspek moralitas individu untuk saling membantu. Dengan harapan yang kaya akan membantu yang miskin. Disisi lain, dalam kampanyenya, ia menegaskan bahwa rakyat India harus mau dan mampu untuk bekerja keras menghidupi diri sendiri.</p>
2	<p>Banyaknya Usaha Kecil Menengah akan mengurangi tingkat kesejahteraan merupakan syarat lain untuk mewujudkan <i>Welfare State</i>. Hal ini dikarenakan pungutan pajak yang tinggi, sehingga jika terdapat banyak UKM, maka akan terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin.</p>	<p>Gandhi juga tidak mungkin menerapkan poin ini di India. Pasalnya, lebih dari setengah penduduk di India bekerja sebagai petani dan juga Usaha kecil Menengah. Sebagai gantinya, Gandhi mengurangi tingkat konsumsi masyarakat yang berlebihan dengan cara <i>swadeshi</i>, yaitu memproduksi dan memakai produk sendiri.</p>
3	<p>Masyarakat yang homogen. Salah satu syarat terjadinya welfare state adalah masyarakat yang homogen, atau setidaknya suku yang ada di suatu negara tersebut sedikit dan penyebarannya tertata sesuai wilayah. Hal ini diharuskan untuk menghindari konflik kesukuan dan agama agar mampu memberikan jaminan keamanan bagi warga.</p>	<p>Tidak mungkin menerapkan masyarakat yang homogen di India. Selain keberadaan agama muslim sebagai agama minoritas disana, sistem kasta dalam agama hindu juga rawan menimbulkan konflik dan SARA. Oleh karena itu, Gandhi melalui pidatonya tentang <i>satyagraha</i>, dan melalui sistem demokrasi <i>sarvodaya</i> yang menyerukan untuk saling menghormati satu sama lain. India saat ini meski tidak secara keseluruhan, telah mampu untuk mengurangi konflik-konflik tersebut.</p>

Di dalam gagasannya ini, Gandhi juga mengutarakan bahwasanya, Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa urusan manusia harus dikelola berdasarkan material, atau untung dan rugi. Oleh karena itu manusia harus membuang jauh-jauh pikiran semacam itu, agar bisa terhindar dari pemanfaatan dan meninggalkan pertimbangan moral.³¹ Karena pertimbangan moral akan menciptakan kerukunan dan perdamaian.

Gandhi juga tidak menafikkan bahwasanya materi merupakan unsur penting di dalam kehidupan manusia. Di dalam konsepnya tentang kesejahteraan, Gandhi menggambarkan bahwasanya tidak perlu ada garis control yang absolut di dalam aspek ekonomi manusia.

Malah Gandhi menyatakan bahwa keadilan adalah dimana semua orang dibebaskan mengeluarkan semua potensinya dan berhak untuk lebih maju dari yang lain jika dia benar-benar berusaha. Namun letak perbedaannya dengan konsep lain tentang ekonomi seperti Neo-Liberalisme adalah adanya aspek moral yang nantinya membuat si pemilik potensi ini kembali ke bawah dan membantu yang lemah dan bukan menjajah.

Di dalam konsepnya tentang membangun sebuah *welfare state*, Gandhi juga menegaskan bahwasanya aspek moral harus berada diatas aspek materiil. Bagi Gandhi, kesejahteraan tidak mungkin bisa dicapai jika ekonomi bertentangan dengan moral. Karena jika hal itu terjadi, maka kegiatan ekonomi yang akan berlangsung hanya akan menguntungkan sebagian orang

saja yang mementingkan ego dan kepentingannya, dan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya semakin melebar.

Hal ini akan berimbas kepada sistem negara yang nantinya juga hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja yang mempunyai kuasa karena memiliki uang.

Oleh karena itu, untuk menuju kepada keinginannya menciptakan sistem kesejahteraan yang baik, Gandhi mengemukakan konsep yang bernama *satyagraha* yang mempunyai makna anti kekerasan, eksploitasi, dan berpegang kepada kebenaran.³² Konsep ini dibuat sedemikian rupa agar mampu menjadi pijakan dalam melakukan kegiatan politis, sosial dan juga ekonomi yang berdasarkan Ahimsa yang mempunyai makna tidak menyerang, menyakiti, dan membunuh yang merupakan prinsip agama Hindu klasik.

Gandhi menginginkan kebenaran dan kejujuran menjadi landasan dasar manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi tidak ada eksploitasi oleh si kaya terhadap si miskin namun justru si kaya membantu si miskin. Sehingga kehidupan dalam bermasyarakat dapat berjalan harmonis dan adil.

Dalam perjalanannya Gandhi juga mulai terfikir tentang kekurangan konsep *satyagraha* dalam menjalankan kesejahteraan. Seperti kelemahan *welfare state* modern yang telah penulis kemukakan diatas, kekhawatiran akan menurunnya semangat kerja juga menjadi pertimbangan gerakan *satyagraha*

Karena selalu diberi oleh yang lebih mampu seperti negara dan orang kaya yang berkewajiban untuk memberi, sehingga mengakibatkan si miskin hanya diam dan tidak bekerja, juga menjadi kelemahan *satyagraha* saat itu. Gandhi yang lama melintang di dalam perjuangan di Afrika Selatan, lalu berlanjut ke India menyadari sesuatu yang penting. Ketika Gandhi memperjuangkan hak-hak masyarakat India di Afrika Selatan, beberapa dari teman-teman

Gandhi merasa hak mereka diatas segalanya sehingga melupakan kewajiban mereka seperti beribadah dan bekerja. Dari situ lah Gandhi menyadari pentingnya kewajiban untuk dijalankan.

Maka Gandhi mengatakan bahwasanya kewajiban harus didahulukan dibandingkan hak. Karena jika sudah menunaikan kewajiban, maka hak pun akan datang dengan sendirinya karena sudah merupakan kepastian.³³ Dan hal ini Gandhi wujudkan dalam konsep yang ia sebut *sarvodaya* yang juga menjadi bagian dari gerakan *satyagraha*.

Konsep *sarvodaya* sendiri memiliki arti tatanan sosial yang berdasarkan kasih sayang dan saling pengertian. Dalam konsep ini, Gandhi coba menjelaskan tentang bagaimana manusia bisa hidup secara berdampingan dan bukan malah saling menyakiti dan mengeksploitasi.

Sarvodaya menjelaskan bahwasanya semua manusia itu mempunyai kewajiban dan hak yang sama yang disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Kewajiban seorang manusia adalah untuk saling membantu sesuai

kemampuan dan hak seorang manusia adalah untuk menggali potensinya dan mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan.

Kesinambungan dan timbal balik seperti ini merupakan tujuan Gandhi di dalam membentuk sebuah pemerintahan yang baik yang sering juga menjadi seruan kampanye-kampanye Gandhi dalam perjuangannya mencapai kesejahteraan India yang saat itu dijajah Inggris.

Aspek moral tetap menjadi dasar penting dalam konsep ini. Perlawanan terhadap oknum-oknum yang ingin eksploitasi harus dilawan dengan non-kekerasan dan harus menggugah si pengeksploitasi agar mau dengan sendirinya mau mengurungkan niatnya dalam menindas.

Tatanan sosial yang berdasarkan saling pengertian dan tidak saling menindas akan menumbuhkan sikap moral yang baik sehingga menciptakan sebuah sikap timbal balik yang baik antara elite yang berkuasa dengan masyarakatnya.³⁴

Elite melakukan kewajibannya dalam mengemban tugas melayani warganya, dan mendapatkan hak mereka sebagai orang yang dihormati dan disegani warganya. Sementara masyarakat berkewajiban untuk berbakti pada negara dan mengkritik serta memperbaiki perilaku elite yang kurang baik sehingga mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh rakyatnya.

³⁴ *Ibid*, Hal 52-53

Dengan begitu, rakyat mendapatkan hak untuk dilayani oleh pemerintah dan mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan seperti ini sangat sulit untuk dicapai jika orang-orang yang berkuasa tetap bersikukuh mempertahankan egonya dan tetap ingin memenagkan kepentingannya dan kelompoknya. Menurut Gandhi, niatan yang baik akan rusak jika pelakunya tidak baik, atau ditengah jalan membelot dan memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan sendiri. Maka dari itu, Gandhi menyinggung tentang pentingnya keterkaitan antara metode dan tujuan.

Gandhi sangat tidak sepakat dalam teori yang menyebutkan bahwasanya segala cara dihalalkan demi mencapai tujuan. Gandhi bersikukuh jika metode atau cara merupakan point paling penting dalam mencapai tujuan. Ia menyatakan bahwa metode itu seperti biji, dan tujuan adalah buahnya.

Jika bijinya tidak baik, maka buahnya pun akan busuk dan tidak seperti yang diharapkan.³⁵ Sulit memang menggunakan metode-metode Gandhi yang berbasiskan kasih sayang dan moralitas.

Kesulitan metode ini juga didorong oleh keinginan masyarakat akan hasil yang instant dan bisa langsung dilihat buahnya. Bagi Gandhi proses tetap menjadi hal yang utama jika ingin mencapai tujuan yang sempurna. Momentum untuk menunjukkan bahwasanya pentingnya filosofi-filosofi

satyagraha, *sarvodaya* dan *ahimsa*. Gandhi tunjukkan ketika

memperjuangkan petani melawan para tuan tanah dan pengeksploitasi di berbagai daerah di India serta mempopulerkannya melalui berbagai tulisan dan pidato-pidato di muka umum.

Setelah itu Gandhi mendengungkan semangat *satyagraha* dan menyerukan perlawanan terhadap penindasan Inggris terhadap India. Pada tahun 1920, Gandhi menjadi figur penting di kancah perpolitikan India. Melalui Indian Nasional Congres (INC).

Gandhi bersama rakyat India lain melakukan perlawanan yang tanpa kekerasan terhadap Inggris dengan cara memboikot terhadap seluruh produksi barang dan jasa serta institusi-institusi yang diperuntukkan bagi orang Inggris. Pada masa perlawanan yang tanpa kekerasan itu lahirlah konsep bernama *swadeshi*, yang mempunyai arti memakai produk sendiri. Di masa itu, kapas yang diekspor ke Inggris sebagai bahan baku tekstil diboikot dan dijadikan bahan baku baju tradisional India yang disebut sebagai *Khadi* yang dibuat dengan roda pemintal yang juga sering disebut *Chakra*. Dan ternyata hal ini benar-benar menyulitkan Inggris karena tidak mampu memproduksi secara maksimal tanpa ada kapas dari India.³⁶

Ekonomi swadeshi dianggap Gandhi sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan di muka bumi India. Namun Gandhi bukannya anti mesin-mesin pabrik. Gandhi selalu berkata, jika mesin pabrik itu memang berguna dan mampu membuat warga India mendapat pekerjaan, maka tidak

ada salahnya mereka ada di India. Tapi dengan syarat keadilan harus ditegakkan antara si pemilik pabrik dengan buruh-buruh India.

Namun sebelum Gandhi sempat melihat semua keseluruhan perjuangannya ini. Gandhi wafat pada tahun 1948, dibunuh oleh seorang Hindu fanatik karena Gandhi dianggap terlalu memihak Islam yang saat itu diperjuangkan Gandhi untuk mendapatkan kursi yang sama di pemerintahan.³⁷

Gandhi telah meninggalkan dunia ini sebelum India memulai perjuangannya pasca kemerdekaannya tahun 1947. Namun ajaran-ajarannya masih tetap melekat di kalangan masyarakat India sampai dengan saat ini.

³⁷ M.K. Gandhi, *Mahatma Gandhi Sebuah Autobiografi*, Penerbit Narasi, Teri, Andi